

PEMBANGUNAN KOPERASI DALAM KEGIATAN USAHA PADA ERA GLOBALISASI

Muhamad Sil
Universitas Terbuka
msil@ut.ac.id

Abstract: Monetary crisis in Indonesia has been going on since 1997, and is still felt to economic development in the era of reform, this is a very broad impact on the economy of Indonesia. It reminds us that there is still much to be improved, refined and reorganized both the structure and activities of the national economy, is no exception to grow the cooperative. Likewise, Indonesia's economic system which according to the constitution. Article 33 UUD 1945 include cooperative institutions to complement the integrated system of national economy. Essentially are how to build cooperative Indonesia menyosong forward in the era of globalization. Cooperative development is the construction of Indonesia's economic pillars: 1) Cooperatives as Economic Business entities in which the cooperative is a collection of people who work together based on equality, working to promote or improve the economic interests of its members and the public interest perpedoman environment with cooperative principles. Aim must be true cooperative mutual interest of its members and the goal was achieved based and services rendered by the members of the cooperative. 2) Cooperative healthy, resilient, Benefit and Friendly. Where cooperatives are characterized by healthy means adequate enterprise scale which allows the achievement of economic efisien cooperative. Tough means that cooperatives can menimalkan risk and survive the global economic konjungtur scale. Benefit means the cooperative will benefit the members, both internal benefits maupun external benefits. Friendly and further means to enhance cooperative relations in economic, social and cultural rights for its members 3) as an effort to equity. Development of cooperatives aimed at better economic and welfare distribution cooperative members. From the description above it can be concluded Indonesia Cooperative development is to build a cooperative member of the social economy as an economic entity, healthy, resilient, benefits and friendly, and economic equality efforts members in the era of globalization.

Keywords: development, cooperatives, globalization

Abstrak: Krisis moneter yang terjadi di Inonesia sudah berlangsung sejak tahun 1997, dan masih terasa sampai pembangunan ekonomi di era reformasi sekarang, ini berdampak yang sangat luas pada perekonomian indonesia. Hal ini menyadarkan kita bahwa masih banyak yang harus dibenahi, disempurnakan, dan ditata kembali baik struktur maupun kegiatan perekonomian secara nasional, tidak terkecuali untuk mengembangkan koperasi. Demikian juga dengan system ekonomi Indonesia yang sesuai konstitusi pasal 33 UUD 1945 memasukkan lembaga koperasi sebagai komplemen yang terintegrasi dalam system perekonomian nasional. Esensinya adalah bagaimana membangun koperasi Indonesia ke depan dalam menyosong era globalisasi. Pembangunan koperasi merupakan pembangunan sokoguru perekonomian Indonesia yaitu 1) Koperasi sebagai badan Usaha Ekonomi dimana koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang secara bersama bekerjasama berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan atau meningkatkan kepentingan ekonomi anggota dan kepentingan masyarakat lingkungannya dengan perpedoman prinsip-prinsip koperasi. Tujuan koperasi harus benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan dan jasa yang disumbangkan oleh para anggota kepada koperasi. 2) Koperasi yang sehat, tangguh, Benefit dan Friendly. Dimana Koperasi sehat berarti dicirikan dengan skala usaha yang memadai yang memungkinkan tercapainya efisien ekonomi koperasi. Tangguh berarti koperasi dapat menimalkan resiko dan bertahan dengan skala konjungtur ekonomi global. Benefit berarti koperasi dapat mendatangkan manfaat bagi anggota, baik manfaat intern maupun manfaat ekstern. Dan selanjutnya Friendly berarti koperasi dapat meningkatkan hubungan secara ekonomi, sosial dan budaya bagi anggotanya 3) sebagai upaya pemerataan. Pembangunan koperasi bertujuan untuk ekonomi yang lebih baik dan pemerataan kesejahteraan para anggota koperasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan pembangunan Koperasi Indonesia adalah untuk membangun sosial ekonomi anggota dengan koperasi sebagai badan usaha ekonomi, sehat, tangguh, benefit dan friendly, dan upaya pemerataan ekonomi anggotanya pada era globalisasi.

Kata kunci: pembangunan, koperasi, globalisasi

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1997, dan masih terasa sampai pembangunan ekonomi era reformasi sekarang, ini berdampak yang sangat luas pada perekonomian Indonesia. Era reformasi yang diharapkan menjadi angin segar untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi kelompok usaha tersebut setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi berjalan dan perekonomian nasional berdasarkan berbagai indikator akses dan makro ekonomi dinyatakan semakin membaik, kondisi dan eksistensi Koperasi dan UMKM dapat dikatakan stagnan bahkan cenderung menurun (Tengku Syarif dan Retno, 2010). Disamping itu, Era globalisasi sebenarnya telah kita masuki sejak abad ke 21 ini. Era globalisasi memberikan konsekuensi pada tidak adanya pembatasan lalu lintas barang jasa antar wilayah atau kawasan.

Hal ini menyadarkan kita bahwa masih banyak yang harus dibenahi, disempurnakan, dan di tata kembali baik struktur maupun kegiatan perekonomian secara nasional, tidak kecuali untuk mengembangkan koperasi. Menurut D.E. Samuel, sistem ekonomi merupakan kumpulan hukum, peraturan yang berkenaan dengan produksi, pertukaran dan konsumsi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa (Samuel, 1998).

Demikian juga dengan system ekonomi Indonesia yang sesuai dengan konstitusi pasal 33 UUD 1945 memasukkan lembaga koperasi sebagai komplemen yang terintegrasi dalam system perekonomian adalah bagaimana

membangunan koperasi Indonesia ke depan dalam menyosong era globalisasi. Hal ini dipertegas dalam TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, yang dipopulerkan dengan sebutan Ekonomi Kerakyatan.

Pasal 5 berbunyi Koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan Ekonomi Nasional harus memperoleh kesempatan, dorongan, dukungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai pemihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN (Kompas tanggal 16 Nopember 1998).

Statistik menunjukkan berbagai upaya telah ditempuh untuk mengembangkan koperasi. Namun peran koperasi dalam ekonomian nasional masih kecil. Walaupun data bukan satu-satunya cara mengukur peran koperasi, namun kontribusi koperasi dalam pendapatan Domestik Bruto (PDB hanya sekitar 5 persen terasa amat kecil, lebih-lebih bila dibandingkan dengan kontribusi BUMN mencapai 25 persen, dan BUMS mencapai 70 persen (Ismawan, 1997). Jadi mengapa koperasi Indonesia yang sudah jelas-jelas merupakan sokoguru perekonomian, gerak usahanya tidak terlalu signifikan dibandingkan usaha besar (konglomerat) dan BUMN. Dalam kegiatan usahanya koperasi hanya unsur sekunder yang jadi penghela atau marginal dalam perekonomian nasional.

Dengan acuan kerangka berpikir diatas, maka penulis mengambil judul Pembangunan Koperasi dalam kegiatan usaha pada Era Globalisasi.

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA EKONOMI

Lahirnya Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, yang menggantikan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 yang dikatakan ekonomisasi telah berubah pengertian koperasi dari sebagai "Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial" menjadi sebagai "Badan Usaha". Sarifuddi Hasan sebagai Menteri Koperasi dan UKM mengatakan UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 bertujuan untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi di Indonesia yang selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global sehingga lebih mendorong tumbuhnya ekonomi Nasional yang semakin meningkat dan sustainable (Harian Anaisa tanggal 19 Oktober 2012).

Sejalan dengan itu Sohibul Iman mengatakan yang menjadi dasa lahir UU Perkoperasian baru ini diantaranya bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia nelalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan perberdayaan koperasi. Koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pnacasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (www.pks.or.id, tanggal 19 Oktober 2012).

Jadi hal ini pembangunan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi insperasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, tangguh, benefit dan fiendly dalam

menghadapi perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Sebagai wadah bersama Koperasi, menurut Thoby Mutis (1992) manfaat koperasi dapat dilihat dalam 3 lingkup :

1. *Internal Benefit* buat anggotanya, yang dapat berupa manfaat ekonomi :peningkatan tabungan, sumber pendapatan dari SHU atas dasar partisipasi, harga yang adil, dan pembelian input produksi dan barang lain lebih murah dibeli oleh anggota.
2. *Economic entity* yang memiliki social content, koperasi meningkatkan interaksi antar manusia yang bermutu bagi anggotanya dalam menuju SDM seutuhnya.
3. *External Benefit* . Manfaat kalangan bukan anggota dalam batas-batas tertentu sesuai dengan lingkungan prinsip kerja koperasi. Hal Ini tercermin penciptaan penciptaan setuasi dan kondisi sehingga manfaat koperasi di dalam menghindarkan pemerasan ekonomis yang terjadi karena monopoli.

Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya adalah tidak mengenal adanya majikan serta tidak ada istilah pemegang saham mayoritas. Semua anggota koperasi komposisi sama, dengan hak suara sama. Oleh karena itu, aktivitas produksi mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) maka semua anggota mendapat menikmati SHU tersebut.

Dengan demikian pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, dan koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam era perdagangan bebas didepan mata, dan telah diimplementasikan tahun 2010 untuk negara industri maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang termasuk Indonesia, persaingan global akan

semakin meningkat dan semakin keras. Interaksi antar negara tersebut mencakup arus perdagangan, investasi, produksi dan keuangan, dimana terdapat interaksi perekonomian lokal atau nasional setiap negara secara efektif merupakan bagian yang tidak otonom dari perekonomian tunggal dunia. Dalam hal ini, kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan dunia usaha melalui proteksi dan subsidi yang berlebihan sulit untuk diterapkan lagi, karena akan menyimpang dari prinsip-prinsip yang melandasi kesepakatan perjanjian Putaran Uruguay atau GATT. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi persaingan tersebut adalah mengurangi ekonomi biaya tinggi, dengan kata lain perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi nasional.

Menyadari bahwa koperasi merupakan badan usaha yang masih relatif lemah dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha negara, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat berkiper dalam era perdagangan bebas. Maka dari itu koperasi perlu membenahi diri dapat merestrukturisasi hambatan internal dengan menghilangkan segala konflik yang ada, dengan cara menumbuhkan etos kerja dan mentalitas kewirausahaan para pengurus dan anggota koperasi. Selanjutnya koperasi perlu membenahi manajemennya yaitu koperasi dimasa yang akan datang menghendaki pengarahannya fokus terhadap pasar. Dengan cara koperasi harus dapat mempergunakan akses kecanggihan teknologi yang ada dalam pengaturan pengelolaan koperasi, oleh karena itu koperasi harus menggunakan internet dalam rangka penyesuaian dengan era globalisasi.

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA YANG SEHAT, TANGGUH, MANDIRI, BENEFIT DAN FRIENDLY

Dilihat dari fungsi, koperasi adalah sebagai atau segyoyanya : sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat, badan usaha dan

gerakan ekonomi rakyat. Koperasi perlu dibangun agar menjadi maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat, dan mampu berperan di semua bidang yang terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Maka pengelolaan koperasi harus efektif dan efisien.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi, diharapkan mampu mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjadi sokoguru perekonomian nasional yang tangguh.

Menurut Hasan (1997) Koperasi yang sehat adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, memberikan SHU yang wajar, dan pengelolaan usahanya sesuai dengan norma-norma ekonomi nasional yang berintikan efektivitas dan efisien. Dengan kata lain koperasi yang sehat adalah dicirikan dengan penerapan kaidah-kaidah bisnis yang tepat dalam rangka normatif koperasi yang benar. Sedangkan koperasi yang tangguh berupa yang mempunyai struktur dan mekanisme organisasi yang mantap, mempunyai *bargaining position* yang memadai dan semakin meningkat serta mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan pasar persaingan bebas. Selanjut koperasi mandiri, menurut Wirasmita (1998) berupa dengan kemampuan pemanfaatan berbagai peluang ekonomi (termasuk pemanfaatan dana, teknologi, pasar dan informasi berskala besar) untuk mempromosikan usaha anggota dan semuanya itu diputuskan sepenuhnya dan atau sebagian besar oleh tim manajemen pengelola koperasi bersama anggotanya. Dengan kata lain mampu mengelola organisasinya tanpa dicampuri pihak luar dan mengembangkan usahanya tanpa didekte oleh pihak lain serta mampu memenuhi kebutuhan dan menghidupi dirinya sendiri. Benefit artinya koperasi mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, baik manfaat intern maupun manfaat ekstern, dan Friendly yaitu

koperasi dapat meningkatkan hubungan secara ekonomi, sosial dan budaya dengan memiliki jiwa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan serta rasa diri, yang mencerminkan watak sosial koperasi yang menempatkan anggotanya bukan saja objek tetapi juga sebagai subjek.

Usaha koperasi dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri, benefit dan friendly harus dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang dianut. Sebagaimana dikatakan Munker (1997) koperasi sebagai lembaga bisnis dalam ekonomi pasar memerlukan basis ekonomi yang kuat untuk bekerja dan mengembangkan diri. Dengan demikian, semangat pembangunan koperasi adalah pada bangsa sendiri, yakni pembangunan untuk mewujudkan kemandirian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi kemakmuran rakyat Indonesia.

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA UNTUK UPAYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

Gerakan koperasi dan pemerintah masa Orba belum mampu membuka telinga, mata dan hati untuk mengelola usaha koperasi secara tulus dan dengan hati nurani untuk kepentingan anggota koperasi. Bukan sekedar untuk mengejar sasaran/target angka pertumbuhan yang dilakukan oleh koperasi terkesan kadang-kadang tidak peduli dan tanggap terhadap kepihakan kepada anggota koperasi (Selama Orba, aparat koperasi cenderung melihat koperasi secara kuantitas, sedangkan pada era reformasi sekarang ini, pola pandang pemerintah; koperasi harus dikelola secara profesional tanpa mengabaikan segi kualitas).

Dilihat dari jiwa koperasi itu adalah kebersamaan diri kata pengusaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam rangka pemerataan ini jelas tidak punya potensi, koperasi harus sehat, kuat, tangguh, mandiri, benefit dan friendly agar saling

menunjang dan saling membantu. Menurut Pasaribu (1992) melalui usaha bersama pemerataan dapat diciptakan, seperti kata pepatah "Ringan sama dijinjing berat sama dan duduk sama rendah berdiri sama tinggi". Sejalan dengan itu, Tanjung (2012) mengatakan bahwa Watak ekonomi kita kerakyatan. Nasionalisme kita adalah nasionalisme kerakyatan, bukan sekedar melindungi pengusaha nasional melawan pengusaha asing karena pengusaha nasional tidak efisien,... ini bisa dilakukan jika ada koreksi terhadap kepincangan pendidikan dan kepincangan pembagian aset ekonomi. Kepincangan pendapatan adalah produk dari kepencangan penguasaan aset ekonomi. Apabila sumbernya tidak dikoreksi, outputnya pasti akan tetap pincang, karena itu perlu adanya redistribusi aset produksi. Selain itu, negara tidak boleh membiarkan orang kecil melawan orang besar dalam pasar bebas.

Usaha koperasi sebagai upaya pemerataan guna mewujudkan kesejahteraan manusia seutuhnya masih idam-idamkan bersama, antara lain untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, alih teknologi dan pemupukan modal serta peningkatan sumber daya manusia. Maka dari itu posisi dan peranan koperasi sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu sebagian besar rakyat yang masih tertinggal didorong untuk masuk menjadi anggota koperasi atau menjadi pengusaha kecil untuk mewujudkan partisipasinya dalam perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, Kartasamita (1996) menyatakan masalah koperasi terlalu mendasar dan sangat prinsipil bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ketetapan hati yakni (a) Karena koperasi amanat konstitusi, tetapi lebih dari sekedar ketentuan formal, (a) juga diyakini bahwa memilih jalan koperasi adalah pilihan yang benar. Kalau koperasi berhasil digalang, ia akan merupakan kekuatan ekonomi yang tangguh dan mampu memberi jalan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan

dengan mengandalkan kemampuannya sendiri.

Maka koperasi dalam era reformasi harus berbenah diri dalam menyongsong liberalisasi ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia yang dicita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud.

SIMPULAN

1. Kesimpulan
 - a. Pembangunan koperasi untuk meningkatkan pembangunan nasional tetapi juga mensejahterakan anggotanya sesuai amanat pas 33 UUD Tahun 1945.
 - b. Koperasi sebagai Badan Usaha ekonomi dalam menghadapi era globalisasi ekonomi harus dapat sehat, tangguh, mandiri, benefit dan friendly.
 - c. Usaha koperasi sebagai upaya pemerataan guna mewujudkan kesejahteraan manusia seutuhnya, antara lain untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, alih teknologi dan pemupukan modal serta peningkatan sumber daya manusia
2. Saran
Pembangunan koperasi yang sangat prinsipil bagi kehidupan bangsa dalam menghadapi era globalisasi ekonomi menuju koperasi yang sehat, tangguh, mandiri, Benefit dan friendly dengan lebih efektif dan efisien, maka pengelolaan perlu untuk ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ketetapan hati segenap bangsa Indonesia.

Direja, Tjahya Gunawan, 2012, *Chairul Tanjung Si Anak Singkong*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Hasan, Usman, 1997, *Koperasi, antara Badan Usaha Ekonomi atau Sosial*, dalam buku *Koperasi Indonesia Menghadapi abad ke-21*, pengantar Dawam Raharjo, Dekopin, Jakarta.

Ismawan, Bambang, 1997, *Menggerakkan dan Mengembangkan Koperasi dari bawah, dan Peranan LSM*, dalam buku *Koperasi di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi*, Formasi, Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.

Munkner, Hans, H., 1997, *Masa Depan Koperasi*, Terjemahan Djabarudin Djohan, Dekopin, Jakarta.

Mutis, Thoby, 1992, *Pengembangan Koperasi; Kumpulan Karangan*, Grasindo, Jakarta.

Pasaribu, Maniur, 1992, *Tantangan yang Pokok adalah bahwa Koperasi diamanatkan oleh Konstitusi*, dalam Infokop No. 12 tahun 1992, Jakarta.

Republik Indonesia, 2012, *Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012*, Jakarta.

Syarif, Teuku dan Retno Satyastuti, 2010, *Kajian Skala Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*, Infokop, Jakarta.

Sumual, D.E., 1998, *Ekonomi Politik Perkoperasian Indonesia*, dalam majalah *Manajemen Usahawan Indonesia*, LMFEUI, Edisi Juli 1998, Jakarta.

Wirasasmita, Yuyun, 1999, *Pokok-pokok Pikiran Civitas Akademika IKOPIN Mengenai Reformasi Koperasi*, Infokop, Jakarta.

Harian Kompas Tanggal 16 Nopember 1998.

Harian Analisa Tanggal 19 Oktober 2012.

www. Pks.or.id, Tanggal 19 Oktober 2012

DAFTAR PUSTAKA